



Website: kominfo.jombangkab.go.id

Email: diskominfo@jombangkab.go.id



RENJA 2022

Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Jombang



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Bupati R Soedirman 92 Jombang 61419

Telp. 0321879913 fax. 0321 879913

Email: diskominfo@jombangkab.go.id

Website: kominfo.jombangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor : 188/085/415.23/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi OPD serta untuk memberikan arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 dan menetapkan dalam Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19) ;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:
1. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022;
 2. Mengadakan koreksi dan perbaikan atas hasil pekerjaan tim baik pada sistematika dokumen, tahapan penyusunan maupun pelaporan penulisan;
 3. Memberikan kontribusi pemikiran secara aktif terhadap penyempurnaan pekerjaan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022;
 4. Memastikan konsistensi dan arah pekerjaan berdasarkan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dimaksud Diktum PERTAMA berpedoman pada ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Membebaskan segala pembiayaan pelaksanaan kegiatan Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 15 Februari 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**



BUDI WINARNO, ST, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19741001 199901 1 001

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1.Sdr.Kepala BAPPEDA Kab. Jombang
2.Sdr.Kepala BPKAD Kab. Jombang
3.Sdr.Inspektur Kab. Jombang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 188/085/415.23/2021
TANGGAL : 15 Februari 2021

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2022**

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Sekretaris	Kasubbag Penyusunan Progam dan Evaluasi,
3	Anggota	Kabid Humas Komunikasi dan Informasi Publik, Kabid Aplikasi Teknologi Informasi Kabid Statistik dan Persandian Staf Penyusunan Progam dan Evaluasi

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 15 Februari 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**

BUDI WINARNO, ST, M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 19741001 199901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Bupati R Soedirman 92 Jombang 61419

Telp. 0321879913 fax. 0321 879913

Email: diskominfo@jombangkab.go.id

Website: kominfo.jombangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 188/086/415.23/2021

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2022, diperlukan perencanaan kerja sebagai arah dan indikator kinerja SKPD sesuai tugas dan fungsi dalam jangka waktu tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);

17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2022.
- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Belanja yang tercantum dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2022 merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan.
- KEEMPAT : Target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2022 dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran.
- KELIMA : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2022 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 15 Februari 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**



BUDI WINARNO, ST, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19741001 199901 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Jombang
3. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Jombang
4. Arsip

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dan setiap tahunnya berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jombang. Renja Tahun 2022 adalah sebuah dokumen perencanaan sampai periode satu tahun 2022 dengan penjabaran dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD pada Tahun 2022.

Penyusunan Renja Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan Daerah, sebagai satu kesatuan dalam satu sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Pembangunan Kerja Daerah (RPKD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan Renja Tahun 2022 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023. Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, yang menyebutkan bahwa penyusunan Renja Tahun 2022 Pemerintah Daerah harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan Renja Tahun 2022 memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaan berdasarkan wilayah dan fungsi, serta ringkasan pendanaan yang memuat rincian urusan, program dan kegiatan yang pendanaannya dipilah menurut sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Dana Alokasi Khusus serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penyusunan rancangan Renja 2022 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal OPD sebagai instansi yang baru. Selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika dengan urusan dan tupoksi sebagai berikut :

a. Urusan

1. Perumusan kebijakan dan program bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan dan program bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian serta menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
7. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
8. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan riil penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2022 adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan beberapa landasan, yaitu mengacu antara lain pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

a. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program / kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan. Renja Tahun 2022 dipergunakan sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas dan pokok fungsinya sampai dengan periode tahun 2022.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah :

- 1. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan tahun 2022 sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- 3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- 4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

b. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bab ini memuat pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Bab ini memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang menatur tentang kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Bab ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2 / 2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2022 mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma Standar Prosedur Kriteria dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bab ini berisikan uraian mengenai penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah sesuai dengan Perda dan Perbup

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab ini berisikan uraian mengenai dukungan PD sesuai proses bisnis dalam mendukung sasaran daerah yang ada di Ranwal RKPD tahun 2022.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab ini memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Bab ini berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya, kaidah pelaksanaannya dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2020) dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang melaksanakan 9 Program dan 23 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 6.934.567.285 (Enam milyar Sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.404.335.136 (Enam milyar empat ratus empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah) atau sebesar 92,35%. Secara rinci pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang. Indikator kinerjanya adalah Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran target 100% dan Pagu Anggaran Rp. 872.236.035. Capaian kinerja mencapai 100% dan realisasi anggaran mencapai Rp. 783.583.643 (89,84%). Program ini dilaksanakan melalui 1 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini direalisasikan untuk.

Realisasi Anggaran sebagai berikut :

Pagu PAPERD	Realisasi	%
872.236.035	783.583.643	89.84

Target Kinerja dan Capaian Kinerja sebagai Berikut

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
Jumlah pemenuhan	22 jenis	100%

pelayanan administrasi perkantoran		
------------------------------------	--	--

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan dalam rangka pemenuhan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor guna menunjang kelancaran tugas kedinasan dengan indikator Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan sebesar 100% dan total anggaran sebesar Rp. 1.100.735.100 terealisasi sebesar Rp. 1.053.416.000 (95,70%). Program ini dilaksanakan melalui 5 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Realisasi Anggaran sebagai berikut :

Pagu PAPD	Realisasi	%
720.110.600	692.030.000	96,10

Target Kinerja dan Capaian Kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
Jumlah / jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	8 jenis	8 jenis

Kegiatan terlaksana dengan baik.

- b. Pemeliharaan Rutin/berkala/sedang/berat Gedung kantor/bangunan pendukungnya

Kegiatan direalisasikan untuk anggaran pemeliharaan Ruang Call Center 112 di Dinas Komunikasi dan Informatika .

Realisasi Anggaran sebagai berikut :

Pagu PAPD	Realisasi	%
78.324.500	77.610.000	99,09

Target kinerja dan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
Tersedianya jasa servis dan suku cadang peralatan dan perlengkapan Gedung kantor	2 gedung	2 gedung

- c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

Kegiatan direalisasikan untuk anggaran pemeliharaan ruang Jombang Command Center (JCC) dan Network Operation Control (NOC, Penggantian suku cadang dan service sarana dan prasarana gedung kantor.

Realisasi Anggaran sebagai berikut :

Pagu PAPD	Realisasi	%
282.850.000	264.380.000	93,47

Target kinerja dan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
Jumlah perlengkapan gedung kantor Yang dipelihara	100 unit	100 unit

Kegiatan terlaksana dengan baik.

- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional

Anggaran berupa servis, suku cadang dan ganti oli kendaraan dinas sebanyak 18 unit. Kegiatan terlaksana dengan baik.

Realisasi Anggaran sebagai berikut :

Pagu PAPD	Realisasi	%
16.750.000	16.696.000	99,68

Target kinerja dan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	18 unit	18 unit

- e. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

Realisasi Anggaran sebagai berikut :

Pagu PAPD	Realisasi	%
2.700.000	2.700.000	100

Target kinerja dan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian	6 stel	6 stel

3. Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD dilaksanakan dengan indikator Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan dengan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan Rp. 15.450.000 (99,68%) dari total anggaran sebesar Rp. 43.700.000.

Program ini dilaksanakan melalui 3 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana kerja SKPD

Realisasi Anggaran sebagai berikut :

Pagu PAPD	Realisasi	%
7.800.000	7.775.000	99,68

Target kinerja dan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
Jumlah dokumen rencana kerja OPD tahunan sebagai rencana/program kegiatan SKPD	2 dokumen	2 dokumen

b. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

Realisasi Anggaran sebagai berikut :

Pagu PAPD	Realisasi	%
4.000.000	3.920.000	98,00

Target kinerja dan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
Jumlah laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen

c. Penyusunan laporan keuangan SKPD

Realisasi Anggaran sebagai berikut :

Pagu PAPD	Realisasi	%
3.650.000	3.640.000	99,73

Target kinerja dan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
Jumlah laporan keuangan OPD tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen

4. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dilaksanakan dengan indikator Persentase informasi ketentuan perundangundangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan target 100% dan terealisasi 100%. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan
 Kegiatan dilaksanakan berupa sosialisasi ketentuan dibidang cukai sebanyak 2 kali di desa jarak kec wonosalam dengan peserta 75 orang dan di desa karangpakis kecamatan kabuh sebanyak 75 orang, kerjasama publikasi peraturan perundang-undangan dibidang cukai melalui media.

Realisasi Anggaran sebagai berikut :

Pagu PAPD	Realisasi	%
345.944.500	316.123.000	91,38

Target kinerja dan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi ketentuan dibidang cukai	150 orang	150 orang

Kegiatan terlaksana dengan baik.

5. Progam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

Progam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik dilaksanakan dengan indikator Persentase publikasi kegiatan pembangunan; Kategori predikat PPID; Persentase KIM yang terbentuk di setiap desa dengan target kinerja 100% dan kinerja terealisasi 100%.

Anggaran program Rp. 764.890.800 dan realisasi anggaran Rp. 706.333.300, realisasi anggaran 92,34%.

Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Fasilitasi publikasi informasi pembangunan daerah

Kegiatan Fasilitasi publikasi informasi pembangunan daerah dilaksanakan melalui penyelenggaraan Warung Pojok Kebon Rojo lokal dan regional dan kerjasama publikasi media.

Pagu PAPD	Realisasi	%
605.358.700	562.044.500	92,84

Target kinerja dan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
Jumlah dialog interaktif melalui media elektronik	5 kegiatan	5 kegiatan

Kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Peningkatan sarana dan prasarana radio

Pagu PAPD	Realisasi	%
119.000.000	105.600.000	88,74

Target kinerja dan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
Radius jangkauan layanan siaran radio di Kabupaten Jombang	20 km	20 km

c. Fasilitasi pengelolaan pelayanan informasi

Pagu PAPD	Realisasi	%
40.232.100	38.388.800	95,42

Target kinerja dan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
Jumlah OPD yang mengikuti kegiatan pelatihan lapor SP4N	75 OPD	75 PD

d. Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat

Anggaran kegiatan mengalami refocussing sehingga dilakukan Perubahan Anggaran. Realisasi Anggaran sebagai berikut.

Pagu PAPD	Realisasi	%
300.000	300.000	100

Target kinerja dan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
-------------------	----------------	-----------------

Jumlah KIM yang terbentuk di setiap desa	0 desa	0 desa
--	--------	--------

Target Kinerja mengalami perubahan Perjanjian Kinerja dikarenakan ada Refocussing anggaran. Target Kinerja sebelum perubahan 5 desa menjadi 0 desa.

6. **Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan dengan indikator Persentase koneksi jaringan yang berfungsi dengan baik target 100% dan realisasi tercapai 100%.

Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. **Fasilitasi pengembangan koneksi jaringan**

Kegiatan direalisasikan untuk anggaran pemeliharaan ruang Jombang Command Center (JCC) dan Network Operation Control (NOC), biaya langganan hostspot di area publik dan pengembangan koneksi jaringan.

Pagu PAPD	Realisasi	%
266.215.000	261.335.400	98,17

Target kinerja dan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
Persentase OPD yang ditingkatkan kualitas dan layanan koneksi pengembangan jaringan.	68%	100%
Jumlah penambahan titik koneksi jaringan diarea publik	3 titik	10 titik

Realisasi kinerja pada kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Pengembangan koneksi jaringan internet dan intranet fiber optic (FO) dan langganan hotspot pada 10 titik meliputi Alun2 jombang 4 titik, Taman Kebon Rojo 2 titik, Taman Kebon Ratu 3 titik, dan Taman Pemkab 1 titik.
- 2) Pengadaan pengembangan ruang Jombang Command;
- 2) b. Pemeliharaan rutin/berkala koneksi jaringan

Pagu PAPD	Realisasi	%
1.751.713.050	1.714.305.226	97,86

Target kinerja dan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
-------------------	----------------	-----------------

Persentase koneksi jaringan OPD yang terpelihara	100 %	100 %
--	-------	-------

keluaran 1) Pemantauan dan pemeliharaan traffic jaringan internet dan intranet lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang; 2) Perbaikan koneksi jaringan sebab force major berupa Rehabilitasi menara telekomunikasi beserta perangkatnya di Kecamatan dan Rehabilitasi jaringan fiber optic Pembangunan jaringan wireless untuk penyelenggaraan intranet dan internet di desa.

- c. Fasilitasi pengelolaan data center dan Disaster Recovery Center (DRC)
- Kegiatan anggaran direalisasikan untuk
- Indikator dan target kinerja dengan keluaran penyelenggaraan operasional 1 data center.

Realisasi anggaran sebagai berikut :

Pagu PAPD	Realisasi	%
336.568.400	320.064.500	95,10

Target kinerja dan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
Jumlah data center yang terbentuk	1 data center	1 data center

- d. Fasilitasi pengelolaan integrasi data
- Kegiatan ini direalisasikan untuk anggaran kegiatan Rapat dan Sosialisasi Pengelolaan Integrasi Data yang bertujuan untuk koordinasi integrasi data OPD serta sosialisasi untuk peserta memberikan wawasan kepada OPD terkait integrasi data, Pengadaan Lisensi C-Panel untuk control panel server yang memudahkan akses ke server bagi OPD dan Pengadaan Memory Server untuk penambahan kapasitas server virtual, Hardisk Server dan Server untuk backup server.
- Indikator kinerja tercapai berupa 3 jenis data terintegrasi yaitu data kependudukan, data kepegawaian serta data perencanaan & anggaran. Kegiatan terlaksana dengan baik.

Realisasi anggaran sebagai berikut :

Pagu PAPD	Realisasi	%
443.274.000	218.274.461	49,24

Target kinerja dan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
Jumlah data aplikasi yang terintegrasi	3 jenis	3 jenis

7. Program Pengembangan Layanan e-Government

Program Pengembangan Layanan e-Government dilaksanakan dengan indikator Persentase sistem aplikasi online dengan target 100% dan capaian realisasi sebesar 100%.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Fasilitasi Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem e-Government

Kegiatan ini direalisasikan untuk anggaran kegiatan Sosialisasi Subdomain, Hosting dan Mail Jombangkab dengan audience seluruh OPD di Kabupaten Jombang, Workshop Pengelolaan Website desa.id dengan audience 302 desa dan 4 kelurahan, 21 kecamatan dan DPMPD, Honorarium Tenaga Ahli Programmer sebanyak 6 orang untuk pembuatan aplikasi kegiatan Pemerintah Daerah dan OPD, Honorarium Tenaga Operator Call Center 112 sebanyak 4 orang dan operasional kegiatan Call Center 112.

Realisasi Anggaran sebagai berikut :

Pagu PAPD	Realisasi	%
846.541.700	833.454.741	98,45

Sesuai dengan target kinerja maka aplikasi/website yang telah tersubdomain meliputi 19 subdomain yaitu

- 1. stream.jombangkab.go.id,
- 2. dlh.jombangkab.go.id,
- 3. rsudploso.jombangkab.go.id,
- 4. e-litbang.jombangkab.go.id,
- 5. sepakat.jombangkab.go.id,
- 6. disdagrin.jombangkab.go.id,
- 7. rsudjombang.jombangkab.go.id,
- 8. saparsudjombang.jombangkab.go.id,
- 9. dekranasda.jombangkab.go.id,
- 10. inspektorat.jombangkab.go.id;
- 11. blonjo.jombangkab.go.id,
- 12. desa.jombangkab.go.id,
- 13. kecamatanploso.jombangkab.go.id,
- 14. simpel-on.jombangkab.go.id,
- 15. bappeda.jombangkab.go.id,
- 16. e.surat.bappeda.jombangkab.go.id,
- 17. e-monev.bappeda.jombangkab.go.id,
- 18. silajang.jombangkab.go.id,
- 19. cloud.jombangkab.go.id.

Target kinerja dan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
Jumlah aplikasi/website OPD yang telah diberikan nama sub domain Jombangkab.go.id	7 sub domain	19 sub domain

Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun melebihi target dikarenakan permintaan dari OPD terkait penamaan sub domain aplikasi.

b. Fasilitasi Tata Kelola e-Government

Kegiatan ini direalisasikan untuk anggaran kegiatan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur di Lingkup Kabupaten Jombang dengan peserta Operator Website OPD di Kabupaten Jombang untuk pengelolaan website guna mendukung pelaksanaan E-Government dan Smart City di kabupaten Jombang sesuai rentang kendali masing-masing OPD, Pelatihan Web Bagi Pelaku IKM dengan peserta pelaku IKM di Kabupaten Jombang untuk pembuatan website dan foto produk, dan Rapat Evaluasi SPBE terkait Smart City dan SPBE bagi seluruh OPD di Kabupaten Jombang .

Realisasi Anggaran sebagai berikut :

Pagu PAPD	Realisasi	%
846.541.700	833.454.741	98,45

Target kinerja dan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
Jumlah dokumen konsultasi	1 dokumen	1 dokumen

8. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah dilaksanakan dengan indikator Persentase data sektoral kabupaten yang dipublikasikan dengan target 100% dan terealisasi 100%.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Fasilitasi pengelolaan data dan statistik

Realisasi Anggaran sebagai berikut :

Pagu PAPD	Realisasi	%
37.280.000	36.930.000	99,06

Target kinerja dan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
-------------------	----------------	-----------------

Jumlah dokumen data sektoral kabupaten jombang	2 dokumen	2 dokumen
--	-----------	-----------

Pelaksanaan kegiatan pada urusan statistik dilakukan melalui tahapan pengumpulan data (primer dan sekunder), pengolahan data, penyajian data dan analisis data yang bersumber dari SKPD, Instansi vertikal, Stakeholders dan masyarakat dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang serta pihak lain yang kompeten di bidangnya guna menghasilkan data dan informasi yang akurat dan *up to date*.

9. Program Penyelenggaraan Persandian

Program penyelenggaraan persandian dilaksanakan dengan indikator Persentase informasi yang dilakukan pengamanan target 100% dan terealisasi 100%. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Fasilitasi penyelenggaraan persandian daerah

Pagu PAPD	Realisasi	%
100.934.000	99.078.500	98,16

Target kinerja dan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
Jumlah komunikasi berita sandi yang diteruskan kepada instansi penerima	396 berita	412 berita

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Dinas Kominfo Kabupaten Jombang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)(2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%) (2020)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)(2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 24	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	22 jenis	22 jenis	22 jenis	22 jenis	100%	N/A	N/A	N/A
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 46	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah / jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	100%	N/A	N/A	N/A
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 47	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	Tersedianya jasa servis dan suku cadang peralatan dan perlengkapan gedung kantor	2 gedung	2 gedung	2 gedung	2 gedung	100%	N/A	N/A	N/A
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 48	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100%	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)(2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%) (2020)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)(2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 49	Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	100%	N/A	N/A	N/A
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 64	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	165 stel	165 stel	165 stel	165 stel	100%	N/A	N/A	N/A
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07	Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 02	Penyusunan rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja OPD tahunan sebagai rencana/program kegiatan SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	N/A	N/A	N/A
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 04	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan OPD tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	N/A	N/A	N/A
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase informasi ketentuan perundangundangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)(2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%) (2020)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)(2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 01	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi ketentuan dibidang cukai	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	100%	N/A	N/A	N/A
2.10 . 2.10.01 . 01 . 22	Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Persentase publikasi kegiatan pembangunan; Kategori predikat PPID; Persentase KIM yang terbentuk di setiap desa	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
2.10 . 2.10.01 . 01 . 22 . 01	Fasilitasi Publikasi Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah dialog interaktif melalui media elektronik	24 kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	5 kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A
2.10 . 2.10.01 . 01 . 22 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Radio	Radius jangkauan layanan siaran radio di Kabupaten Jombang	10 km	10 km	10 km	20 km	100%	N/A	N/A	N/A
2.10 . 2.10.01 . 01 . 22 . 03	Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan Informasi	Jumlah OPD yang mengikuti kegiatan pelatihan lapor SP4N	75 OPD	75 OPD	75 OPD	75 OPD	100%	N/A	N/A	N/A
2.10 . 2.10.01 . 01 . 22 . 04	Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah KIM yang terbentuk di setiap desa	5 desa	5 desa	5 desa	0 desa	100%	N/A	N/A	N/A
2.10 . 2.10.01 . 01 . 23	Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase koneksi jaringan yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
2.10 . 2.10.01 . 01 . 23 . 01	Fasilitasi Pengembangan Koneksi Jaringan	1)Persentase OPD yang ditingkatkan kualitas dan layanan koneksi pengembangan jaringan	67%	67%	68%	68%	100%	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)(2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%) (2020)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)(2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(2) Jumlah penambahan titik koneksi jaringan diarea publik	3 titik	3 titik	10 titik	10 titik	100%	N/A	N/A	N/A
2.10 . 2.10.01 . 01 . 23 . 02	Pemeliharaan rutin/berkala koneksi jaringan	Persentase koneksi jaringan OPD yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
2.10 . 2.10.01 . 01 . 23 . 03	Fasilitasi Pengelolaan Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC)	Jumlah data center yang terbentuk	1 data center	1 data center	1 data center	2 data center	100%	N/A	N/A	N/A
2.10 . 2.10.01 . 01 . 23 . 04	Fasilitasi Pengelolaan Integrasi Data	Jumlah data aplikasi yang terintegrasi	3 data aplikasi	3 data aplikasi	3 jenis	3 jenis	100%	N/A	N/A	N/A
2.10 . 2.10.01 . 01 . 24	Program Pengembangan Layanan e-Government	Persentase sistem aplikasi online	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
2.10 . 2.10.01 . 01 . 24 . 01	Fasilitasi Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem e-Government	Jumlah aplikasi/website OPD yang telah diberikan nama sub domain Jombangkab.go.id	7 subdomain	7 subdomain	7 subdomain	19 subdomain	100%	N/A	N/A	N/A
2.10 . 2.10.01 . 01 . 24 . 02	Fasilitasi Tata Kelola e-Government	Jumlah dokumen konsultasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	N/A	N/A	N/A
2.14 . 2.10.01 . 01 . 17	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase data sektoral kabupaten yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
2.14 . 2.10.01 . 01 . 17 . 01	Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah dokumen data sektoral kabupaten jombang	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	N/A	N/A	N/A
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15	Program Penyelenggaraan Persandian	Persentase informasi yang dilakukan pengamanan	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)(2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%) (2020)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)(2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Persandian Daerah	Jumlah komunikasi berita sandi yang diteruskan kepada instansi penerima	396 berita	396 berita	396 berita	412 berita	100%	N/A	N/A	N/A
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-
2 1 0 2.0 6 1 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-
2 1 0 2.0 01 6 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dokumen	-	-
2 1 0 2.0 06 6 1 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 laporan	-	-
2 1 0 2.0 6 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-
2 1 0 2.0 01 6 1 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika yang di fasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14 kali	-	-
2 1 0 2.0 03 6 1 2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan penyediaan honorarium pengelola keuangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11 kegiatan	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)(2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%) (2020)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)(2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 1 0 2.0 05 6 1 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan OPD yang tersusun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	-	-
2 1 0 2.0 6 1 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-
2 1 0 2.0 10 6 1 5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penerima informasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	450 orang	-	-
2 1 0 2.0 6 1 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-
2 1 0 2.0 01 6 1 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 lokasi	-	-
2 1 0 2.0 02 6 1 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 lokasi	-	-
2 1 0 2.0 04 6 1 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 jenis	-	-
2 1 0 2.0 05 6 1 6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 jenis	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)(2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%) (2020)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)(2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah pemenuhan barang penggandaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 jenis	-	-
2 1 0 2.0 06 6 1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 media	-	-
2 1 0 2.0 09 6 1 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 kali	-	-
2 1 0 2.0 6 1 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-
2 1 0 2.0 02 6 1 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 lokasi	-	-
2 1 0 2.0 04 6 1 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 jenis	-	-
2 1 0 2.0 6 1 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-
2 1 0 2.0 01 6 1 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)(2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%) (2020)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)(2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	-	-
2 1 0 2.0 02 6 1 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17 unit	-	-
		Jumlah kendaraan dinas/operasional dibayarkan pajaknya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17 unit	-	-
2 1 0 2.1 03 6 2 0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 lokasi	-	-
2 1 0 2.0 11 6 1 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasara gedung kantor yang dipelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 lokasi	-	-
2 1 0 6 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	61 (sedang)	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang komunikasi dan informatika	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	83,5 (baik)	-	-
2 1 0 2.0 6 2 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3%	-	-
2 1 0 2.0 6 2 1 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 media	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)(2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%) (2020)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)(2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 1 0 2.0 06 6 2 1	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah program siaran radio per minggu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7 program	-	-
		Persentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti sesuai SOP PPID	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-
		Prosentase pengaduan di SP4N LAPOR yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-
		Jumlah desa yang terbentuk KIM baru dan dilaksanakan pembinaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 desa	-	-
2 1 0 2.0 12 6 2 1	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah mitra kerjasama media cetak dan elektronik informasi pembangunan daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45 mitra kerjasama	-	-
		Jumlah pengikut akun resmi pemerintah daerah di media sosial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.000 pengikut	-	-
2 1 0 6 3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Level 2	-	-
		Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18 indikator terkelola	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)(2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%) (2020)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)(2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 1 0 2.0 6 3 1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-
		Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	67%	-	-
2 1 0 2.0 6 3 1	02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah subdomain sesuai standar penyelenggaraan subdomain	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	43 subdomain	-	-
2 1 0 2.0 6 3 1	03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah terkoneksi jaringan intra sesuai standar penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	68 titik	-	-
2 1 0 2.0 6 3 2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%	-	-
2 1 0 2.0 6 3 2	01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan SPBE pada aspek TIK yang disusun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 dokumen	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)(2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%) (2020)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)(2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 1 0 2.0 03 6 3 2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pusat data sesuai standar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%	-	-
2 1 0 2.0 07 6 3 2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah sistem elektronik dibangun/ dikembangkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 aplikasi	-	-
2 2 0 0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	-	-
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,51 (baik)	-	-
2 2 0 2.0 0 2 1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dokumen	-	-
2 2 0 2.0 01 0 2 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah koordinasi pengumpulan dan pengolahan data sektoral Kabupaten Jombang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9 kali	-	-
2 2 0 2.0 03 0 2 1	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang dikelola	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28 data sektoral	-	-
2 2 0 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50%	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)(2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%) (2020)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)(2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 2 0 1 1 3	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50%	-	-
2 2 0 2.0 1 1 2 1 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengamanan informasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 sistem elektronik	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam IKK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tahun 2021, pelaksanaan indikator kinerja disesuaikan dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing tupoksi sebagai berikut :

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

- Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo

Persentase Jumlah OPD di Kabupaten Jombang terhubung dengan akses internet dan akses internet berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo 100% meliputi 61 OPD. Jaringan Intra Pemerintah Daerah menggunakan koneksi Fiber Optic (FO).

- Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo

Persentase Jumlah OPD di Kabupaten Jombang yang menggunakan akses internet berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo 100% meliputi 61 OPD. Desa dan Kecamatan menggunakan jaringan wireless. Bandwidth sebesar 600 MB untuk client, 200 MB untuk server, dan 200 MB

- Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah.

Penyediaan bandwith yang cukup untuk OPD yang bisa digunakan untuk akses internet, berbasis suara, video, teks data dan sinyal

2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

- Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015

Layanan public di Pemkab Jombang yang dimanfaatkan secara daring meliputi sebagai berikut :

1. Urus KTP dukcapil.jombangkab.go.id
2. SIRINDUNONA perizinan.jombangkab.go.id
3. Pendaftaran Online RSUD Jombang rsudjombang.jombangkab.go.id

- Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar

18 OPD yang memiliki web sesuai standart x 100% = 29.5%
61 OPD yang ada di Kabupaten Jombang

Saat ini situs web OPD di Kabupaten Jombang dengan subdomain namaopd.jombangkab.go.id dimiliki 18 OPD dari 61 OPD yaitu (1) bkd.jombangkab.go.id, (2) bapenda.jombangkab.go.id, (3)bappeda.jombangkab.go.id, (4) bpbd.jombangkab.go.id, (5) dpm-ptsp.jombangkab.go.id, (6) kominfo.jombangkab.go.id, (7) pertanian.jombangkab.go.id, (8) disdagrin.jombangkab.go.id, (9) disnaker.jombangkab.go.id, (10) pupr.jombangkab.go.id, (11) dlh.jombangkab.go.id, (12) dukcapil.jombangkab.go.id, (13) dinkes.jombangkab.go.id, (14) inspektorat.jombangkab.go.id, (15) rsudjombang.jombangkab.go.id, (16) plosoraja.jombangkab.go.id, (17) jdih.jombangkab.go.id, (18) sibaja.jombangkab.go.id.

OPD yang belum memiliki website sesuai dengan penamaan domain sesuai dengan PERMEN no 28 Tahun 2006 tentang domain go.id difasilitasi dalam portal website Pemkab Jombang dengan alamat www.jombangkab.go.id. Halaman website jombangkab memiliki halaman utama, terdapat pula subpage 61 OPD yang dikelola oleh masing-masing OPD Kabupaten Jombang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan

Aplikasi umum dan khusus SIMDA integrated telah digunakan oleh 61 OPD sehingga tercapai 100%.

- Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik

20 layanan publik & administrasi pemerintahan x 100% = 55.56%
36 indikator dokumen SPBE

Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan tercapai 55,56%. Layanan SPBE yang tercantum sebagai berikut :

**REKAPITULASI DATA LAYANAN PUBLIK DAN
LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SESUAI DOKUMEN PROSES BISNIS
TAHUN 2020**

No.	Aplikasi Fungsional	Ada/ Tidak Ada	Nama Aplikasi	Unit Kerja/Perangkat Daerah Pengelola
1	2	3	4	5
I	LAYANAN PUBLIK			
1	Sistem Informasi Tenaga Kerja	Tidak Ada	-	-
2	Sistem Informasi Pendidikan	Tidak Ada	-	-
3	Sistem Informasi Kepemudaan	Tidak Ada	-	-
4	Sistem Informasi Kesehatan	Ada	SIMPUS	Dinas Kesehatan
5	Sistem Informasi Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kemiskinan	Ada	SIM-PMKS	Dinas Sosial
6	Sistem Informasi Koperasi dan UMKM	Ada	Website Blonjo	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
7	Sistem Informasi Perindag	Ada	e-Katalog Harga Pangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
8	Sistem Informasi EXIM	Tidak Ada	-	-
9	Sistem Informasi Pertanian	Ada	Adaptif dan Simfoni	Dinas Pertanian
10	Sistem Informasi Peternakan	Tidak Ada	-	-
11	Sistem Informasi Perkebunan	Tidak Ada	-	-
12	Sistem Informasi Perikanan	Tidak Ada	-	-
13	Sistem Informasi Kehutanan	Tidak Ada	-	-
14	Sistem Informasi Tanam Pangan	Tidak Ada	-	-
15	Sistem Informasi Wisata dan Budaya	Ada	Jombang Travel	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
16	Sistem Informasi Investasi	Tidak Ada	-	-
17	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Ada	SIPPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
18	Sistem Informasi Pendayagunaan Air	Tidak Ada	-	-

19	Sistem Informasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Ada	NOC	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Sistem Informasi Tata Ruang, Jalan dan Jembatan	Ada	Sistem Informasi Aset Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21	Sistem Informasi Energi Terbarukan	Tidak Ada	-	-
22	Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Tidak Ada	-	-
II	Administrasi dan Manajemen Umum			
1	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	Ada	SIMDA Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Ada	SIMDA Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Sistem Informasi Pengadaan	Ada	LPSE, SIBAJA	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4	Sistem Informasi Pembangunan	Ada	SIPPEM	Bagian Administrasi Pembangunan
5	Sistem Informasi Legislasi	Tidak Ada	-	-
6	Sistem Informasi Kearsipan	Tidak Ada	-	-
7	Sistem Informasi Kebencanaan	Ada	Sistem Pelaporan Kejadian Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Sistem Informasi Pengawasan	Ada	SIMHPI	INSPEKTORAT
III	Administrasi Legislasi			
1	Sistem Informasi Jaringan dan Dokumentasi Hukum	Ada	JDIH	Bagian Hukum
2	Sistem Informasi Legislatif	Tidak Ada	-	-
IV	Manajemen Keuangan			
1	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Ada	SIMDA Integrated	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda	Ada	SIMDA Integrated	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
V	Sistem Informasi Keuangan Daerah			
1	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Ada	SIMDA Integrated	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
VI	Manajemen Kepegawaian			
1	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada	SIAP ASN	Badan Kepegawaian Daerah,

			Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Jenis Layanan	36		
Layanan Tersedia	20		

- Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik

18/20 ×100% = 90%

DATA LAYANAN PUBLIK DAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
YANG SUDAH MEMANFAATKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
TAHUN 2020

No.	Aplikasi Fungsional	Sudah/ Belum	Nama Aplikasi	Unit Kerja/ Perangkat Daerah Pengelola
1	2		4	5
1	Sistem Informasi Kesehatan	Sudah	SIMPUS	Dinas Kesehatan
2	Sistem Informasi Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kemiskinan	Sudah	SIM-PMKS	Dinas Sosial
3	Sistem Informasi Koperasi dan UMKM	Sudah	Website Blonjo	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
4	Sistem Informasi Perindag	Sudah	e-Katalog Harga Pangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
5	Sistem Informasi Pertanian	Sudah	Adaptif dan Simfoni	Dinas Pertanian
6	Sistem Informasi Wisata dan Budaya	Sudah	Jombang Travel	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
7	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Sudah	SIPPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Sistem Informasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sudah	NOC	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Sistem Informasi Tata Ruang, Jalan dan Jembatan	Sudah	Sistem Informasi Aset Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	Belum	SIMDA Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
11	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Belum	SIMDA Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

12	Sistem Informasi Pengadaan	Sudah	LPSE, SIBAJA	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
13	Sistem Informasi Pembangunan	Sudah	SIPPEM	Bagian Administrasi Pembangunan
14	Sistem Informasi Kebencanaan	Sudah	Sistem Pelaporan Kejadian Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15	Sistem Informasi Pengawasan	Sudah	SIMHPI	INSPEKTORAT
16	Sistem Informasi Jaringan dan Dokumentasi Hukum	Sudah	JDIH	Bagian Hukum
17	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Sudah	SIMDA Integrated	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
18	BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda	Sudah	SIMDA Integrated	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
19	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Sudah	SIMDA Integrated	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20	Sistem Informasi Kepegawaian	Sudah	SIAP ASN	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Layanan Tersedia		20		
Layanan yang sudah menggunakan Sertifikat Elektronik		18		

- Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belum tersedia sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah

Aplikasi yang terintegrasi dengan sistem layanan pemerintah yaitu 100% sebagai berikut:

1. Aplikasi “Urus KTP”

“Urus KTP” merupakan inovasi terhadap pelayanan pencetakan KTP elektronik bagi Masyarakat Jombang. Dengan adanya aplikasi "Urus KTP Jombang" yang dapat diunduh di google playstore diharapkan memudahkan penduduk jombang untuk melakukan pengurusan KTP elektronik. Penduduk hanya akan datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kecamatan yang ditunjuk pada saat mengambil KTP elektronik tersebut.

Aplikasi ini terhubung dengan data penduduk dari Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI)

2. Aplikasi “SiRinduNona”

Sistem Perizinan Terpadu Non Berusaha (SiRinduNona) merupakan aplikasi yang ditujukan untuk masyarakat yang ingin mengajukan permohonan perijinan non berusaha seperti Surat Izin Praktek (SIP) untuk tenaga kesehatan agar tidak perlu datang dan antri di kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP. Masyarakat cukup mengunjungi laman <https://perizinan.jombangkab.go.id/> untuk mendapatkan Surat yang dikehendaki. Aplikasi SiRinduNona terhubung dengan data penduduk dari Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) dan online.

3. Aplikasi “Pendaftaran Online RSUD Jombang”

Aplikasi Pendaftaran Online RSUD Jombang merupakan fasilitas yang diberikan oleh RSUD Jombang kepada masyarakat yang akan berobat ke poliklinik RSUD yang semula harus mengantri untuk mendaftar di loket pendaftaran, kini cukup melakukan pendaftaran melalui laman <https://rsudjombang.jombangkab.go.id/> untuk mendapatkan nomer antrian di poliklinik yang dituju.

Aplikasi “Pendaftaran Online RSUD Jombang” terhubung dengan data penduduk dari Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) serta terhubung dengan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

- Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah
Belum ada perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah, dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten Jombang belum memiliki pusat data (data center).
- Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)

$\frac{31}{61} \times 100\% = 50,82\%$
--

DAFTAR SIKLUS PEMBARUAN DATA

ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (OPD)

TAHUN 2020

NO	INSTANSI	SIKLUS PEMBARUAN DATA	NAMA APLIKASI
1	2	3	4
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3 Bulan	Aplikasi SIAP ASN
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1 Bulan	Aplikasi SISMIOP, Aplikasi BPHTB
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 Bulan	SIMDA Keuangan, SIMDA Aset, SIMDA Gaji
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6 Bulan	SIPD, Website Berkadang, Website SRA, Website Sinergitas, Website e-Litbang, Aplikasi KRISNA
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 Bulan	Sistem Pantauan Hujan, Sistem Pelaporan Kejadian Bencana
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6 Bulan	SIRINDUNONA
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 Bulan	JASNITA, Mail Jombangkab, Cloud Jombangkab, Sensus ASN, Website Sigap COVID-19
8	DINAS PERHUBUNGAN	3 Bulan	ATCS, SIKIR ONLINE, SIMOLEN, SIMLLAJ, SIDPJ
9	DINAS PERTANIAN	6 Bulan	Website ADAPTIF, Website SIMFONI
10	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1 Bulan	E-Katalog Harga Bahan Pokok, Sistem Layanan Tera dan Tera Ulang
11	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	3 Bulan	Aplikasi Belanja Online UMKM
12	DINAS PEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	3 Bulan	Aplikasi Jombang Travel
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 Tahun	PPDBSMP, PPDBSD
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 Bulan	SISKEUDES
15	DINAS SOSIAL	3 Bulan	SIM-PMKS
16	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6 Bulan	Sistem Informasi Aset Tanah

17	DONAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	6 Bulan	SIM Pelaporan
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Bulan	Layanan Permohonan SPPL Online
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1 Bulan	e-Pusda
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1 Bulan	SIAK, SISCA MANIS, UrusKTP
21	DINAS KESEHATAN	1 Bulan	SIMPUS
22	INSPEKTORAT	1 Bulan	E-AUDIT, SIMHPI, Whistle Blowing System
23	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG	1 Bulan	Pendaftaran Online
24	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO	3 Bulan	ArGon
25	KECAMATAN PETERONGAN	6 Bulan	Aplikasi SITAHU-TERONG
26	BAGIAN ORGANISASI	1 Bulan	e-TPP, SIAA, e-SAKIP
27	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	6 Bulan	SIPPEM (e-MONEV)
28	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	1 Tahun	Website Sepakat
29	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	3 Bulan	Aplikasi Pendataan UMKM
30	BAGIAN HUKUM	1 Bulan	Website JDIH
31	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1 Bulan	LPSE, SIBAJA, SIRUP
JUMLAH OPD		31	

- Persentase data yang dapat berbagi pakai
 $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$

DAFTAR DATA BERBAGI PAKAI
KABUPATEN JOMBANG
Tahun 2020

NAMA DATA	OPD Pengguna Data
Data Kependudukan	Dinas Sosial, DPM-PTSP, RSUD Jombang
Data ASN	Bagian Organisasi

- Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city

$$\frac{31}{61} \times 100\% = 50,82\%$$

REKAPITULASI DATA INOVASI PENDUKUNG *SMART CITY* PADA
ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (OPD)
TAHUN 2020

NO	INSTANSI	NAMA INOVASI
1	2	3
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Aplikasi SIAP ASN
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Aplikasi SISMIOP, Aplikasi BPHTB
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SIMDA Keuangan, SIMDA Aset, SIMDA Gaji
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	SIPD, Website Berkadang, Website SRA, Website Sinergitas, Website e-Litbang, Aplikasi KRISNA
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Sistem Pantauan Hujan, Sistem Pelaporan Kejadian Bencana
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	SIRINDUNONA
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	JASNITA, Mail Jombangkab, Cloud Jombangkab, Sensus ASN, Website Sigap COVID-19
8	DINAS PERHUBUNGAN	ATCS, SIKIR ONLINE, SIMOLEN, SIMLLAJ, SIDPJ
9	DINAS PERTANIAN	Website ADAPTIF, Website SIMFONI
10	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	E-Katalog Harga Bahan Pokok, Sistem Layanan Tera dan Tera Ulang
11	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Aplikasi Belanja Online UMKM

12	DINAS PEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	Aplikasi Jombang Travel
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PPDBSMP, PPDBSD
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SISKEUDES
15	DINAS SOSIAL	SIM-PMKS
16	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sistem Informasi Aset Tanah
17	DONAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	SIM Pelaporan
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Layanan Permohonan SPPL Online
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	e-Pusda
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SIAK, SISCA MANIS, UrusKTP
21	DINAS KESEHATAN	SIMPUS
22	INSPEKTORAT	E-AUDIT, SIMHPI, Whistle Blowing System
23	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG	Pendaftaran Online
24	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO	ArGon
25	KECAMATAN PETERONGAN	Aplikasi SITAHU-TERONG
26	BAGIAN ORGANISASI	e-TPP, SIAA, e-SAKIP
27	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SIPPEM (e-MONEV)
28	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Website Sepakat
29	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	Aplikasi Pendataan UMKM
30	BAGIAN HUKUM	Website JDIH

31	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	LPSE, SIBAJA, SIRUP
JUMLAH OPD		31

- Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo
 $1/3 \times 100\% = 33,33\%$

DATA ASN TENAGA PENGELOLA TIK TAHUN 2020
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG

NAMA	NIP	KETERANGAN
NUR FATIH , S.Kom	19890725 201505 2 001	Sertifikasi
FIRLANA NURDIANSYAH , S.Kom	19830225 201101 1 004	Belum Sertifikasi
LAVANNA INDANUS RAMADHAN, S.Kom.	19960130 201903 1 003	Belum Sertifikasi

- Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government.

Implementasi e-government tertuang dalam dokumen Masterplan SmartCity, Arsitektur SPBE dan Analisis Strategis SmartCity.

3. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota

REKAPITULASI KOMUNITAS MASYARAKAT/ MITRA STRATEGIS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2020

NO	NAMA KOMUNITAS	STATUS	KETERANGAN
1	PWI Kabupaten Jombang	AKTIF	Persatuan Wartawan Indonesia
2	Jombang Travel	AKTIF	Komunitas Pegiat Pariwisata di Kab. Jombang
3	UKM Jombang	AKTIF	Komunitas UMKM di Kab. Jombang
4	KIM Desa Menturus, Kudu	AKTIF	Kelompok Informasi Masyarakat Desa Menturus Kecamatan

			Kudu
5	KIM Desa Plandaan, Plandaan	AKTIF	Kelompok Informasi Masyarakat Desa Plandaan Kecamatan Plandaan
6	KIM Desa Temuwulan, Perak	AKTIF	Kelompok Informasi Masyarakat Desa Temuwulan Kecamatan Perak
7	KIM Desa Bawangan, Ploso	AKTIF	Kelompok Informasi Masyarakat Desa Bawangan Kecamatan Ploso
8	KIM Desa Pulosari, Bareng	AKTIF	Kelompok Informasi Masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Bareng
JUMLAH		8	8

- **Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)**

Jumlah program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota dengan strategi komunikasi (STRAKOM)
 ----- x 100%

Jumlah program dan kebijakan STRAKOM yang dipublikasikan

107 jumlah program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota
dengan strategi komunikasi (STRAKOM) x 100%

107 jumlah program dan kebijakan STRAKOM yang dipublikasikan

Program dan kebijakan pemerintah dipublikasikan melalui portal resmi Jombangkab.

REKAPITULASI KONTEN INFORMASI
PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

NO	BULAN	JUMLAH	MEDIA PUBLIKASI
1	Januari	18	Website https://jombangkab.go.id/
2	Februari	11	Website https://jombangkab.go.id/
3	Maret	13	Website https://jombangkab.go.id/
4	April	5	Website https://jombangkab.go.id/

5	Mei	3	Website https://jombangkab.go.id/
6	Juni	20	Website https://jombangkab.go.id/
7	Juli	41	Website https://jombangkab.go.id/
8	Agustus	35	Website https://jombangkab.go.id/
9	September	33	Website https://jombangkab.go.id/
10	Oktober	33	Website https://jombangkab.go.id/
11	November	30	Website https://jombangkab.go.id/
12	Desember	30	Website https://jombangkab.go.id/
JUMLAH		272	

- **Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan**

Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan ----- x 100%

Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dipublikasikan

107 jumlah diseminasi dan layanan informasi public yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)dan SOP yang telah ditetapkan ----- x 100% = 100%

107 jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dipublikasikan

Program dan kebijakan pemerintah dipublikasikan melalui website JDIH dan portal resmi Jombangkab.

**REKAPITULASI KEGIATAN DISEMINASI DAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2020**

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH	MEDIA PUBLIKASI
----	---------------	--------	-----------------

1	Publikasi Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah	106	Website https://jdih.jombangkab.go.id/
2	Permintaan Informasi melalui PPID	1	Website https://ppid.jombangkab.go.id/
JUMLAH		107	

- **Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah**

Belum ada perangkat daerah yang menyimpan pusat data pemerintah, dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten Jombang belum memiliki pusat data (data center).

STATISTIK

Outcome :

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota

Rumus penilaian :

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota
----- x 100%
Jumlah penduduk

28.083 peserta dengan sasaran penyebaran informasi publik x 100% = 3%
935.692 jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Jombang

Penyebaran informasi publik dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Jombang melalui sosialisasi ke masyarakat sebagai berikut :

DATA PELAKSANAAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020
TERKAIT KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG

NO	URAIAN	LOKASI	KETERANGAN
1	Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Bidang Cukai	1. Desa Jarak, Kec. Wonosalam 2. Desa Karangpakis, Kec. Kabuh	300 orang peserta
2	Warung Pojok (WARJOK) Lokal dan	Dilaksanakan sebanyak 3	1200 orang peserta

	Regional	kali Warjok Lokal dan 2 Kali Warjok Regional	
3	Sosialisasi Lapor SP4N	Jl. KH. Wahid Hasyim 133 (Car Free Day)	150 orang peserta
4	Sosialisasi dan Evaluasi SPBE	Dilaksanakan sebanyak 2 kali kegiatan	75 orang peserta
5	Sosialisasi Desain Grafis dan Fotografi untuk UKM	Aula Besut Dinas Kominfo	120 orang peserta
6	Sosialisasi Pengelolaan Website Desa	Ruang Bung Tomo dan Ruang Soero Adiningrat	306 orang peserta
7	Sosialisasi Subdomain, Hosting dan Mail	Ruang Soero Adiningrat	103 orang peserta
8	Pengikut di Instagram @jombang_kab	Instagram	11.800 <i>followers</i>
9	<i>Subscriber</i> di Facebook Kabupaten Jombang	Facebook	4.999 <i>subscribers</i>
10	<i>Subscriber</i> di Youtube Jombangkab TV	Youtube	571 <i>subscribers</i>
11	Jangkauan Siaran Radio SJFM di 21 Kecamatan	Frekuensi 104.1 FM dan streaming radio online	7.650 pendengar
12	Seminar Daring <i>Zoom Meeting</i> tentang Vaksinasi	Radio SJFM dan Youtube	809 peserta
TOTAL			28.083 orang

PERSANDIAN

Output

Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian 158 645 × 100% = 24,50%

Hasil evaluasi telah dijabarkan dalam Buku **Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi di Kabupaten Jombang Tahun 2020** yang telah diserahkan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy, adapun hasil evaluasi akhir seperti yang tercantum dalam Buku Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi di Kabupaten Jombang Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil Evaluasi Akhir Tingkat Keamanan Informasi

KATEGORI	SKOR	SKOR MAKSIMAL	TINGKAT KEMATANGAN
Tata Kelola	19	126	I +
Pengelolaan Resiko	17	72	I
Kerangka Kerja Keamanan Informasi	32	159	I +
Pengelolaan Aset	51	168	I +
Teknologi dan Keamanan Informasi	39	120	II
JUMLAH SKOR	158	645	Tidak Layak

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat keamanan informasi infrastruktur teknologi informasi dan ruang server pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang masuk dalam tingkat kematangan “TIDAK LAYAK” dengan skor perolehan 158 dari total skor 645.

Outcome :

- Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan.**
Belum ada kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal, dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur tentang pengamanan kegiatan strategis di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang.
- Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah.**
Belum ada sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian, dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur tentang penerapan SMKI di lingkup Pemeritah Kabupaten Jombang.
- Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah**

Jumlah nilai per area keamanan informasi

----- Jumlah area penilaian $\frac{21}{58} \times 100\% = 36,21\%$	x 100%
---	-------------------

- Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan.**
 Belum ada titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS), penetapan titik pada pemerintahan daerah yang harus diamankan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kominfo Kabupaten Jombang

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			KETERANGAN
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur			100%	100%	100%	Bidang Sekretariat
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan			100%	100%	100%	
	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun			3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun			5 laporan	5 laporan	5 laporan	
	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%	100%	
	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Kominfo yang difasilitasi			14 kali	14 kali	14 kali	
	Jumlah kegiatan penyediaan honorarium pengelola keuangan			11 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan	
	Jumlah dokumen laporan keuangan OPD yang tersusun			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100%	100%	100%	
	Jumlah penerima informasi terkait peraturan perundang-undangan dibidang cukai			450 orang	450 orang	450 orang	Bidang Humas dan Komunikasi Publik

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			KETERANGAN
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	100%	100%	Bidang Sekretariat
	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi			3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi			3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	
	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi			2 jenis	2 jenis	2 jenis	
	Jumlah pemenuhan barang cetak			4 jenis	4 jenis	4 jenis	
	Jumlah pemenuhan barang penggandaan			1 jenis	1 jenis	1 jenis	
	Jumlah pemenuhan bahan bacaan			3 media	3 media	3 media	
	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			5 kali	5 kali	5 kali	
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			100%	100%	100%	
	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terfasilitasi			3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	
	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			5 jenis	5 jenis	5 jenis	
	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik			100%	100%	100%	

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			KETERANGAN
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit	1 unit	1 unit	
	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya			1 unit	1 unit	1 unit	
	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara			17 unit	17 unit	17 unit	
	Jumlah kendaraan dinas/operasional dibayarkan pajaknya			17 unit	17 unit	17 unit	
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara			2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	
	Jumlah sarana dan prasara gedung kantor yang dipelihara			3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	
	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)			61 (sedang)	62 (sedang)	63 (sedang)	Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang komunikasi dan informatika			83,5 (baik)	84 (baik)	84,5 (baik)	
5	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik			3%	3,1%	3,2%	
	Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi			5 media	5 media	5 media	
	Jumlah program siaran radio per minggu			7 program	7 program	7 program	

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			KETERANGAN
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti sesuai SOP PPID			100%	100%	100%	
	Prosentase pengaduan di SP4N LAPOR yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	
	Jumlah desa yang terbentuk KIM baru dan dilaksanakan pembinaan			5 desa	5 desa	5 desa	
	Jumlah mitra kerjasama media cetak dan elektronik informasi pembangunan daerah			45 mitra kerjasama	45 media	45 media	
	Jumlah pengikut akun resmi pemerintah daerah di media sosial			12.000 pengikut	13.000 pengikut	14.000 pengikut	
	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi			Level 2	Level 2	Level 2	Bidang Aplikasi Teknologi
	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)			18 indikator terkelola	18 indikator terkelola	18 indikator terkelola	
	Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%	
	Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	67%	100%	100%	
	Jumlah subdomain sesuai standar penyelenggaraan subdomain			43 subdomain	64 subdomain	68 subdomain	

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			KETERANGAN
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah perangkat daerah terkoneksi jaringan intra sesuai standar penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah			68 titik	68 titik	68 titik	
	Persentase Aplikasi yang terintegrasi			20%	20%	20%	
	Jumlah dokumen penyelenggaraan SPBE pada aspek TIK yang disusun			4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	
	Persentase pemenuhan pusat data sesuai standar			20%	25%	30%	
	Jumlah sistem elektronik dibangun/ dikembangkan			5 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	
	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan			100%	100%	100%	
	Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika			3,51 (baik)	3,52 (baik)	3,53 (baik)	
	Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang			3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
	Jumlah koordinasi pengumpulan dan pengolahan data sektoral Kabupaten Jombang			9 kali	9 kali	9 kali	Bidang Statistik
	Jumlah data statistik sektoral yang dikelola			28 data sektoral	28 data sektoral	28 data sektoral	
	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik			50%	75%	100%	

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			KETERANGAN
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi		Tingkat keamanan informasi pemerintah	50%	75%	100%	
	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengamanan informasi			2 sistem elektronik	3 sistem elektronik	3 sistem Elektronik	

2.2 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil reviu pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2020 dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang telah berlangsung cukup baik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai mediator masyarakat dengan aparatur dalam penyampaian informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam penyelenggara penyampaian informasi di pemerintah daerah di berbagai wilayah dituntut untuk lebih produktif, rasional dan mengikuti perkembangan yang ada serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, maka masih terdapat beberapa permasalahan yang krusial dalam rangka pengembangan penyampaian informasi, diantaranya :

Form Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis

Identifikasi Permasalahan	Akar Masalah	Data/Informasi Terkait	Isu Strategis
1	2	3	4
Terbatasnya Informasi Publik yang diterima masyarakat	Keterbatasan Akses Informasi yang diterima oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang baik dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pemerintahan yang belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga menimbulkan isu tuntutan penciptaan pemerintahan yang dipercaya masyarakat.
	Masih kurangnya kesadaran OPD untuk memberikan informasi pada publik		
	Pembinaan Komunikasi Informasi Masyarakat (KIM) yang belum optimal		
Masih Rendahnya Pemanfaatan Aplikasi OPD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Sistem Aplikasi yang dibangun OPD sulit untuk diintegrasikan	Indeks SPBE	Perlunya mengoptimalkan Sistem pemerintahan yang integratif
	Belum optimalnya pembangunan / penyediaan jaringan internet dalam rangka meningkatkan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik		
	Pada saat pembuatan aplikasi tidak berkoordinasi dengan Dinas Kominfo		
Masih rendahnya Indeks SPBE	Komitmen OPD di Lingkungan Pemkab masih kurang khususnya dalam Pelaksanaan SPBE		
	Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal		
Masih rendahnya Indeks Keamanan Informasi	Kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi	Indeks KAMI BSSN	
	Terbatasnya Tenaga Teknis Untuk Pengamanan		

	Informasi		
	Antrian penanganan sertifikat elektronik di BSSN		
Kesulitan pengumpulan data sektoral yang ada pada OPD	OPD menunda/ tidak mengirim data sektoral yang diminta	Portal Satu Data Kabupaten Jombang	
Inkonsistensi data	Metodologi yang digunakan dan jangka waktu yang dipakai		
	Keterbatasan SDM yang baik dari segi jumlah maupun pengetahuan		
Belum ada standarisasi data dan kualitas analisis data yang belum terjamin	terdapat kesenjangan data antara yang dibutuhkan dengan data yang tersedia		
	perubahan alur pengumpulan data sektoral		

Usaha penanggulangan masalah yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah:

- Pengembangan e-government guna peningkatan kualitas layanan publik baik dari sisi kemudahan, efisiensi waktu, biaya, dan administrasi. Memberikan informasi kepada masyarakat melalui *e-government* tanpa harus datang ke kantor dengan memberikan layanan media komunikasi elektronik selain di website juga melalui android dan IOS.
- Penyediaan dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Meningkatkan kualitas SDM yang menangani infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Pelatihan untuk pegawai dalam bidang keilmuan komunikasi dan Informatika
- Mengupayakan peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi dalam memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, baik antar sektor di lingkungan pemerintahan, pemerintah dengan stakeholders maupun pemerintah dengan masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, berikut review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 Kabupaten Jombang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Jombang

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Cat
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Danan (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Jombang	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	9.629.619.432	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Jombang	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	9.629.619.432	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	50.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	50.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 dokumen	25.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jombang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jombang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 laporan	25.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	100%	4.369.619.432	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	100%	4.369.619.432	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika yang di fasilitasi	14 kali	4.109.619.432	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika yang di fasilitasi	14 kali	4.109.619.432	

No	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Cat
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang	Jumlah kegiatan penyediaan honorarium pengelola keuangan	11 kegiatan	250.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang	Jumlah kegiatan penyediaan honorarium pengelola keuangan	11 kegiatan	250.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jombang	Jumlah dokumen laporan keuangan OPD yang tersusun	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jombang	Jumlah dokumen laporan keuangan OPD yang tersusun	1 dokumen	10.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	1.000.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	1.000.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Jombang	Persentase penerima informasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai	450 orang	1.000.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Jombang	Persentase penerima informasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai	450 orang	1.000.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.110.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.110.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Jombang	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	3 lokasi	500.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Jombang	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	3 lokasi	500.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jombang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	3 lokasi	250.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jombang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	3 lokasi	250.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jombang	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	2 jenis	250.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jombang	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	2 jenis	250.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Cat
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Jombang	Jumlah pemenuhan barang cetak	4 jenis	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Jombang	Jumlah pemenuhan barang cetak	4 jenis	50.000.000	
		Kab. Jombang	Jumlah pemenuhan barang penggandaan	1 jenis			Kab. Jombang	Jumlah pemenuhan barang penggandaan	1 jenis		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Jombang	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	3 media	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Jombang	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	3 media	10.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jombang	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 kali	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jombang	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 kali	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	725.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	725.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jombang	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terfasilitasi	3 lokasi	375.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jombang	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terfasilitasi	3 lokasi	375.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	5 jenis	350.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	5 jenis	350.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	2.375.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	2.375.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kab. Jombang	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kab. Jombang	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	150.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Cat
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Danan (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jombang	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya	1 unit		Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jombang	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya	1 unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Jombang	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	17 unit	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Jombang	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	17 unit	25.000.000	
		Kab. Jombang	Jumlah kendaraan dinas/operasional dibayarkan pajaknya	17 unit			Kab. Jombang	Jumlah kendaraan dinas/operasional dibayarkan pajaknya	17 unit		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 lokasi	350.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 lokasi	350.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah sarana dan prasara gedung kantor yang dipelihara	3 lokasi	1.850.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah sarana dan prasara gedung kantor yang dipelihara	3 lokasi	1.850.000.000	
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Jombang	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	62 (sedang)	2.717.267.000	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Jombang	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	62 (sedang)	2.717.267.000	
		Kab. Jombang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang komunikasi dan informatika	84 (baik)			Kab. Jombang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang komunikasi dan informatika	84 (baik)		
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	3,1%	2.717.267.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	3,1%	2.717.267.000	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Jombang	Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi	5 media	750.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Jombang	Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk	5 media	750.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Cat
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			informasi					diseminasi informasi			
		Kab. Jombang	Jumlah program siaran radio per minggu	7 program			Kab. Jombang	Jumlah program siaran radio per minggu	7 program		
	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Jombang	Persentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti sesuai SOP PPID	100%	245.449.000	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Jombang	Persentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti sesuai SOP PPID	100%	245.449.000	
		Kab. Jombang	Prosentase pengaduan di SP4N LAPOR yang ditindaklanjuti	100%			Kab. Jombang	Prosentase pengaduan di SP4N LAPOR yang ditindaklanjuti	100%		
		Kab. Jombang	Jumlah desa yang terbentuk KIM baru dan dilaksanakan pembinaan	5 desa			Kab. Jombang	Jumlah desa yang terbentuk KIM baru dan dilaksanakan pembinaan	5 desa		
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Jombang	Jumlah mitra kerjasama media cetak dan elektronik informasi pembangunan daerah	45 media	1.721.818.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Jombang	Jumlah mitra kerjasama media cetak dan elektronik informasi pembangunan daerah	45 media	1.721.818.000	
		Kab. Jombang	Jumlah pengikut akun resmi pemerintah daerah di media sosial	13.000 pengikut			Kab. Jombang	Jumlah pengikut akun resmi pemerintah daerah di media sosial	13.000 pengikut		
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Jombang	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Level 2	3.675.041.200	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Jombang	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Level 2	3.675.041.200	
		Kab. Jombang	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)	18 indikator terkelola			Kab. Jombang	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)	18 indikator terkelola		
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub	Kab. Jombang	Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100%	2.450.000.000	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh	Kab. Jombang	Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100%	2.450.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Cat
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain	100%		Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain	100%		
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Jumlah subdomain sesuai standar penyelenggaraan subdomain	64 subdomain	100.000.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Jumlah subdomain sesuai standar penyelenggaraan subdomain	64 subdomain	100.000.000	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Jombang	Jumlah perangkat daerah terkoneksi jaringan intra sesuai standar penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah	68 titik	2.350.000.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Jombang	Jumlah perangkat daerah terkoneksi jaringan intra sesuai standar penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah	68 titik	2.350.000.000	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	20%	1.225.041.200	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	20%	1.225.041.200	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Jumlah dokumen penyelenggaraan SPBE pada aspek TIK yang disusun	2 dokumen	85.505.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Jumlah dokumen penyelenggaraan SPBE pada aspek TIK yang disusun	2 dokumen	85.505.000	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan pusat data sesuai standar	25%	400.000.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan pusat data sesuai standar	25%	400.000.000	
	Pengembangan Aplikasi dan	Kab. Jombang	Jumlah sistem elektronik	2 aplikasi		Pengembangan Aplikasi	Kab. Jombang	Jumlah sistem elektronik	2 aplikasi		

No	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Cat
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		dibangun/ dikembangkan		739.536.200	dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		dibangun/ dikembangkan		739.536.200	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Jombang	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	100%	295.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Jombang	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	100%	295.000.000	
		Kab. Jombang	Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	3,52 (baik)			Kab. Jombang	Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	3,52 (baik)		
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang	3 dokumen	295.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang	3 dokumen	295.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Jombang	Jumlah koordinasi pengumpulan dan pengolahan data sektoral Kabupaten Jombang	9 kali	175.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Jombang	Jumlah koordinasi pengumpulan dan pengolahan data sektoral Kabupaten Jombang	9 kali	175.000.000	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Jombang	Jumlah data statistik sektoral yang dikelola	28 data sektoral	120.000.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Jombang	Jumlah data statistik sektoral yang dikelola	28 data sektoral	120.000.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Jombang	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	75%	140.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Jombang	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	75%	140.000.000	
			Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi	75%				Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi	75%		
	Penyediaan Layanan	Kab. Jombang	Jumlah sistem elektronik yang	3 sistem	140.000.000	Penyediaan Layanan	Kab. Jombang	Jumlah sistem elektronik yang	3 sistem	140.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Cat
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		telah dilakukan pengamanan informasi	elektronik		Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		telah dilakukan pengamanan informasi	elektronik	0	

2.5 Penelaahan Usulan Progam dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten Jombang Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tidak mendapatkan usulan dari masyarakat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai hubungan nasional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendukung keberhasilan pembangunan Nasional secara keseluruhan. Berdasarkan rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024, tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
- 2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
- 3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Perencanaan progam dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membantu dan mendukung berjalannya seluruh progam dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi progam dari pusat sampai ke daerah. Sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi dan misi RPJMN 2020-2024 VISI : ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Visi dan Misi Kemenkominfo selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut:

- 1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- 2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;

3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, meliputi :

1. Mengoptimalkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur;
2. Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan hubungan komunikasi;
3. Mengoptimalkan regulasi Pengembangan dan Pemanfaatan Smart Province oleh Perangkat Daerah;
4. Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya;
5. Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Jawa Timur.

VISI Dinas Kominfo Prov. Jawa Timur yaitu : "Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong" dan MISI 3 yaitu "Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka,

Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan”

Misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dengan mengacu misi ke tiga Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan”

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, implikasi rencana tata ruang dan wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis dapat teridentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1. Menyebarkan informasi dengan memanfaatkan TIK;
- 2. Mengelola Isu Publik melalui Monitoring Media
- 3. Mengimplementasikan e-Government / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 4. Meningkatkan Infrastruktur dan Pengintegrasian Data Di Seluruh OPD
- 5. Mewujudkan Satu Data di Jawa Timur

Selanjutnya untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dan dalam rangka mendukung progam-progam Bupati Kabupaten Jombang, Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada visi dan misi Bupati terpilih.

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan dan menyangkut arah pelaksanaan organisasi pemerintah harus dibawa agar dapat berkarya secara konsisten, antisipasi dan produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh penyelenggara pemerintah. Visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jombang harus dicapai dalam tahun 2023, untuk itu RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 adalah merupakan penjabaran dan visi, misi dan progam Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah serta RPJM Nasional. Adapun visi Kabupaten Jombang adalah **“Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing”**.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Jombang tersebut maka ada 3 misi yaitu :

- 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional
- 2. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya

3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri

Dari semua 3 misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam misi Kabupaten Jombang salah satunya yang merupakan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu misi – 1 yaitu Mewujudkan Tata kelola Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.

Berdasarkan 3 misi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan visi untuk periode tahun 2018-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”

Rumusan visi tersebut dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagaiberikut :

- *Penyebaran Informasi* memiliki maksud bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika adalah merupakan institusi yang merumuskan, menyusun, memonitoring, mengevaluasi serta memiliki wewenang untuk menyebarluaskan informasi pembangunan serta kegiatan daerah.
- *Pelayanan publik (public service)* memiliki maksud bahwaDinas Komunikasi dan Informatika harus mampu memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*),dan harapan (*expectation*) masyarakat. Dalam hal ini kebutuhan masyarakat yang harus di utamakan dan di penuhi adalah kebutuhan akan keterbukaan dan kemudahan mendapatkan informasi.

Misi adalah merupakan fondasi penyusunan rencana strategis. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi (pelaksana) pemerintah. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka setiap Instansi Pemerintah harus mempunyai misi yang jelas dan sekaligus merupakan persyaratan guna mendapatkan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan.

Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika merumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika.
2. Mengembangkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi Dinas Kominfo Kabupaten Jombang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dari Renja Dinas Kominfo Tahun 2022 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi.

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Kominfo serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Renja Tahun 2022 Dinas Kominfo yaitu Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika dan Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE.

Sasaran kinerja Dinas Kominfo yang telah direncanakan disusun indikator kinerja dan formulasi perhitungannya. Perhitungan formulasi tersebut adalah sebagai berikut:

FORM TUJUAN, SASARAN PERUBAHAN RENSTRA PD TAHUN 2018-2023

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran (IKD)	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Profesional	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas	Indeks Good Governance	Meningkatkan kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kualitas Layanan Publik bidang Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika
								Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika
			Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE		Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 Indikator)	Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 Indikator)

3.3. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 merupakan bagian dari upaya Pemerintah kabupaten Jombang dalam mencapai target, sasaran pembangunan dan arah kebijakan di tahun 2022 yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Kominfo Tahun 2018-2023. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 telah disesuaikan dengan Permendagri 90 yaitu:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaram dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 1.1.1 Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 1.2.1 Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.3 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 1.3.1 Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 1.4.1 Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2 Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3 Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.4 Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.5 Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.6 Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1.5.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1.6.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 3.2.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3.2.2 Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 3.2.3 Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.7 Program Informasi dan Komunikasi Publik

1.7 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- 1.7.1 Subkegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- 1.7.2 Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik
- 1.7.3 Subkegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

2. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

2.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- 2.1.1 Subkegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- 2.1.2 Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

2.2 Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- 2.2.1 Subkegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- 2.2.2 Subkegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
- 2.2.3 Subkegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota

- 3.1.1 Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

3.1.2 Membangun Metadata Statistik Sektoral

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

4.1 KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

4.1.1 Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Program dan Kegiatan di Dinas Komunikasi dan Publik tahun 2022 dilaksanakan sebagai berikut :

Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan agar tersampaiannya informasi kepada masyarakat tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai kepada pedagang rokok eceran, perangkat desa dan masyarakat perokok aktif;
Sosialisasi bertujuan untuk mengendalikan peredaran rokok ilegal dan penerimaan cukai tembakau yang ilegal dengan target 450 orang dengan narasumber dari Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai Kabupaten Kediri.
- Tersosialisasikannya aplikasi LAPOR SP4N kepada masyarakat;
LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu. LAPOR! dikembangkan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Tujuan sosialisasi LAPOR SP4N untuk memberikan kesempatan pada masyarakat dalam menyampaikan aduan permasalahan atas pelayanan publik.
Kegiatan dimaksudkan untuk menjemput informasi atau aduan warga atas pelayanan umum maupun pengaduan warga terhadap fasilitas umum. Selain itu juga mengenalkan pada masyarakat tentang tata cara penyampaian aduan melalui saluran yang benar dan tepat.
- Tersosialisasikan UU informasi publik kepada kepala desa;
PPID yang ada Dinas Kominfo Kabupaten Jombang bertugas mengelola data dan informasi yang dikuasai oleh badan publik. Pengelolaan di sini meliputi pendataan, pengumpulan, pendokumentasian hingga pengarsipan. Selain pengelolaan, PPID juga bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ada dua cara menyampaikan informasi, yaitu pertama

dengan cara mengumumkan melalui media yang mudah dijangkau, dan kedua dengan cara memberikannya kepada masyarakat yang melakukan permintaan informasi.

Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Dinas Kominfo Kabupaten Jombang melaksanakan sosialisasi Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui sosialisasi ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- Terlaksananya Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat;
- Terlaksananya pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat kepada pengurus KIM;
- Terlaksananya Warjok lokal (menginformasikan kepada masyarakat kegiatan informasi daerah), bulaga (pelayanan masyarakat) dan publik speaking di sekolah Jombang;

Berdasarkan keterbukaan informasi publik untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui program “Warung Pojok” disingkat Warjok, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mengadakan rutin kegiatan dialog interaktif dan solutif pada setiap bulannya. Kegiatan dialog interaktif dan solutif lokal dikemas dalam perbincangan atau percakapan dengan topik yang dipilih menghadirkan narasumber.

Kegiatan Bupati Layani Warga atau disebut Bulaga merupakan pelayanan gratis kepada masyarakat. Diantaranya, berupa cek kesehatan, kemudahan pembayaran pajak serta mendapatkan informasi tentang pajak, pelayanan SIM Keliling dan pembayaran pajak kendaraan, pelayanan warga berupa administrasi kependudukan seperti kartu keluarga, akta kelahiran, KTP Elektronik dsb. Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai tupoksi melaksanakan penyebaran diseminasi dan pelayanan IT untuk kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat.

- Penyebarluasan informasi terkait kegiatan Pemerintah Daerah melalui website Jombangkan dan Kanal resmi media sosial

Untuk percepatan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait kegiatan dan kebijakan pemerintah, Dinas Kominfo Kabupaten Jombang menyebarluaskan informasi melalui website jombangkab.go.id, Instagram pemkab Jombang dan channel Youtube Kabupaten Jombang.

- Penyebarluasan informasi melalui kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana radio dilakukan melalui radio Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu Suara Jombang FM (SJFM).

Program siaran radio dengan 7 program perhari melalui SJFM meliputi:

PROGRAM SIAR REGULER
RADIO PUBLIK LOKAL SUARA JOMBANG FM 104,1

Jam	Nama Program	Format Program	Komposisi
04.00	Opening & Lagu Indonesia Raya	Putar File untuk opening siaran	Pop
04.00-07.00	-Tartil ‘Qur’an, Tarhim, Adzan Shubuh -Kajian Islam Pagi Suara Jombang	Putar File Pengajian KH. Djamaluddin Ahmad, Pengasuh Pondok Pesantren Al Muhibbin Tambakberas Jombang	Religi Islami
07.00-08.00	Cakrawala sesi I	INFORMASI Siaran kata; Menghadirkan informasi lokal Jombang (politik, ekonomi, sosial, budaya) ; Mengundang pendengar untuk menyampaikan informasi atau berkomentar baik melalui jalur telepon, WA,atau sms; Konfirmasi dengan narasumber terkait dengan isu lokal yang sedang hangat dibicarakan.	Indonesia pertengahan (rancak)
08.00-10.00	Cakrawala Sesi II	1. INFORMASI perbincangan isu isu nasional 2. TALKSHOW INTERAKTIF Senin : 07.00-08.00 Dinamika Jawa Timur ; Relay Program Asosiasi LPPL Jawa Timur 09.00-09.40 Insidental 10.00-11.00 Nasional Is Me ; Relay Program Asosiasi LPPL, Persada.Id Selasa : 09.00-09.40 Talkshow Anti Hoax (MAFINDO Koord. Jombang) 10.00-10.40 PELESIR ; Talkshow Pariwisata bersama BPPD Kab. Jombang Rabu : 09.00-09.40 Pojok Kesehatan (Dinas Kesehatan Kab. Jombang) 11.00-11.40 Talkshow Covid 19 bersama IDI Kab. JOmbang Kamis : 09.00-09.40 Kiat mandiri bersama UMKM dan Enterpreneur Muda Jombang 10.00-11.00 Talkshow Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit KPC PEN; Persada.Id. Jum’at : 09.00-09.40 Halo Anak; BPPKB-PPPA >>> Membuka line telepon, WA atau SMS untuk interaktif pendengar Putar File Berita hasil produksi liputan Tim Reportase	Indonesia Pertengahan (boleh slow)
10.00-12.00	Break In Time	HIBURAN Siaran kata dengan menyisipkan info info ringan seputar	Mancanegara Easy

		lifestyle, selebritis dan info info ringan lainnya. >> Putar Adzan Dhuhur sesuai dengan jadwal waktu Shalat untuk daerah Jombang dan sekitarnya dengan Hot clock yang ditetapkan	Listening (Non Hits)
12.00 – 13.00	Jombang Interaktif	INFORMASI Dibawakan oleh satu orang announcer dibantu oleh dua orang gatekeeper. Menghadirkan tema yang beragam di setiap harinya. Tema diambil dari kebutuhan masyarakat atas informasi maupun pelayanan publik. Nara sumber dihadirkan melalui wawancara telepon dengan announcer. Jumlah nara sumber menyesuaikan dengan kebutuhan pembahasan tema. Nara sumber diambilkan dari OPD terkait atau lembaga-lembaga swasta yang berwenang untuk memberikan klarifikasi atas suatu masalah, atau berwenang untuk memberikan informasi. Nara sumber sudah dipersiapkan sebelumnya untuk bisa standby dalam rentang waktu antara 12.00 s/d 13.00. Program ini mengundang masyarakat untuk berinteraktif melalui dua jalur (telepon dan WA), untuk memberikan laporan keluhan atau komentar atas tema yang dibahas.	Manca – Indo Hits
13.00-15.00	Gayeng Marem	HIBURAN Siaran kata dengan menggunakan bahasa Jawa Jombangan; menemani pendengar beristirahat siang dengan gending dan campur sari; membuka line interaktif dengan pendengar melalui telepon, WA atau SMS. Informasi terkini lokal/nasional/Internasional (sumber: Detik.com/ Kompas/Liputan6/SS.net ,	Gending & Campur Sari
15.00-17.00	DANSA Dangdut Asyik Suara Jombang	HIBURAN Siaran Kata; menemani pendengar beraktifitas santai di sore hari' membuka line interaktif telepon, WA atau SMS	Dangdut Konvensional
17.00-18.00	Jelang Petang	- Putar File Lagu - Putar Adzan Maghrib menyesuaikan dengan jadwal waktu shalat untuk daerah Jombang dan sekitarnya - Putar Murattal	Lagu Religi
18.00-19.00	Senada indonesia POP	HIBURAN Putar File ; segmentasi anak muda; men ghadirkan tangga nada lagu teratas di setiap minggunya;	Lagu Indonesia HITS
19.00-21.00	Goyang Dangdut Malam	HIBURAN Siaran Kata; menemani pendengar beristirahat di malam hari; membuka line interaktif telepon, WA atau SMS	Dangdut Koplo Terbaru
21.00 – 22.00	Muaik Ingat-Ingat	HIBURAN Putar File ; segmentasi dewasa; men ghadirkan lagu oldies Indonesia; Pengantar istirahat malam	Lagu oldies Indonesia era 70-80an
22.00-23.00	Ngakak Bareng Kartolo	Putar File Senin – Rabu, Jum'at : Lawakan Kartolo Kamis : Shalawat Minggu : Wayang Kulit	-
23.00	Closing & Lagu Wajib Nasional	Putar file lagu untuk closing siaran	
Program PERNIK			
Menit ke-00 02 15	Update Info Covid 19 Informasi Hoax Lintas Informasi Lokal	Putar File yang diproduksi dan ready setiap hari	-

Bidang Aplikasi Teknologi Informasi

- Penyediaan jaringan FO untuk OPD perkotaan maupun jaringan wireless kecamatan untuk meningkatkan kapasitas jaringan internet 306 desa/kelurahan guna fasilitasi digitalisasi desa;
- Pembangunan jaringan FO untuk seluruh OPD milik Pemkab, untuk meningkatkan legalitas penggunaan FO;
- Peningkatan kapasitas jaringan wireless (penggantian perangkat) pada 21 kecamatan dan repeater untuk meningkatkan kapasitas jaringan interner 306 desa/kelurahan guna fasilitasi digitalisasi desa;
- Bandwidth sebesar 600 MB untuk client, 200 MB untuk server, dan 200 MB untuk VPN kecamatan. Pada Tahun 2022 Peningkatan kapasitas bandwith untuk client meningkatkan service level agreement (SLA);
- Penyediaan ruang server yang sesuai dengan standart SNI untuk fasilitasi hosting aplikasi pemerintah;
- Integrasi aplikasi pemerintahan dan layanan umum;
- Pengembangan dan pembangunan aplikasi baru untuk mendukung layanan pemerintahan dan layanan umum sebagaimana diamanatkan dalam perpres SPBE.

Bidang Statistik

- Mendorong OPD untuk update data sectoral secara berkala melalui portal satu data Kabupaten Jombang (satudata.jombangkab.go.id);
Portal Satu data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, dan interoperabilitas data. Untuk memudahkan OPD dalam menginput data, dan memudahkan pengguna data untuk memperoleh data. Dinas Kominfo pada saat ini telah membangun aplikasi Portal Satu Data dan MOU dengan BPS Jombang dalam kemudahan pemenuhan data statistik.
- Sistem elektronik yang dilakukan pengamanan informasi

Rincian total kebutuhan dana/pagu indikatif progam dan kegiatan usulan tahun 2022 ditampilkan dalam tabel berikut:

TABEL 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Nama Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2022 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju (2023)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9.629.619.432	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		8.129.619.432	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Jombang	100%	9.629.619.432	DAU		100%	8.129.619.432
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Jombang	100%	50.000.000	DAU		100%	50.000.000
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	Jombang	3 dokumen	25.000.000	DAU		3 dokumen	25.000.000
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Jombang	5 laporan	25.000.000	DAU		5 laporan	25.000.000
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	Jombang	100%	4.369.619.432	DAU		100%	4.369.619.432
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika yang di fasilitasi	Jombang	14 kali	4.109.619.432	DAU		14 kali	4.109.619.432
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan penyediaan honorarium pengelola keuangan	Jombang	11 kegiatan	250.000.000	DAU		11 kegiatan	250.000.000
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan OPD yang tersusun	Jombang	1 dokumen	10.000.000	DAU		1 dokumen	10.000.000
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jombang	100%	1.000.000.000	DAU		100%	1.000.000.000

2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penerima informasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai	Jombang	450 orang	1.000.000.000	DBH CHT		450 orang	1.000.000.000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jombang	100%	1.110.000.000	DAU		100%	960.000.000
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	Jombang	3 lokasi	500.000.000	DAU		3 lokasi	250.000.000
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	Jombang	3 lokasi	250.000.000	DAU		3 lokasi	250.000.000
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	Jombang	2 jenis	250.000.000	DAU		2 jenis	250.000.000
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	Jombang	4 jenis	50.000.000	DAU		4 jenis	50.000.000
		Jumlah pemenuhan barang penggandaan	Jombang	1 jenis		DAU		1 jenis	
2.16.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	Jombang	3 media	10.000.000	DAU		3 media	10.000.000
2.16.01.2.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jombang	5 kali	50.000.000	DAU		5 kali	50.000.000
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jombang	100%	725.000.000	DAU		100%	725.000.000
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terfasilitasi	Jombang	3 lokasi	375.000.000	DAU		3 lokasi	375.000.000
2.16.01.2.09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jombang	5 jenis	350.000.000			5 jenis	350.000.000
2.16.01.2.09.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Jombang	100%	2.375.000.000	DAU		1 unit	1.025.000.000
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Jombang	1 unit	150.000.000	DAU		1 unit	150.000.000

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya							
2.16.01.2.09.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	Jombang	17 unit	25.000.000	DAU		17 unit	25.000.000
		Jumlah kendaraan dinas/operasional dibayarkan pajaknya		17 unit				17 unit	
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Jombang	2 lokasi	350.000.000	DAU		3 lokasi	350.000.000
2.16.02	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasara gedung kantor yang dipelihara	Jombang	3 lokasi	2.454.467.000	DAU		63 (sedang)	2.568.939.000
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang komunikasi dan informatika	Jombang	84 (baik)	2.717.267.000	DAU		84,5 (baik)	2.717.267.000
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Jombang	3.1%				3,2%	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi	Jombang	5 media	750.000.000	DAU		5 media	800.000.000
		Jumlah program siaran radio per minggu	Jombang	7 program				7 program	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti sesuai SOP PPID	Jombang	100%	245.449.000	DAU		100%	309.921.000
		Persentase pengaduan di SP4N LAPOR yang ditindaklanjuti	Jombang	100%				100%	
		Jumlah desa yang terbentuk KIM baru dan dilaksanakan pembinaan	Jombang	5 desa				5 desa	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kerjasama media informasi pembangunan daerah	Jombang	45 media	1.459.018.000	DAU		45 media	1.459.018.000
		Jumlah pengikut akun resmi pemerintah daerah di media sosial	Jombang	13.000 pengikut				14.000 pengikut	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Jombang	Level 2	3.675.041.200	DAU		Level 2	3.925.089.800
		Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)	Jombang	18 indikator terkelola				18 indikator terkelola	

2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jombang	100%	2.450.000.000	DAU		100%	2.577.500.000
		Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain	Jombang	100%				100%	
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah subdomain sesuai standar penyelenggaraan subdomain	Jombang	64 subdomain	100.000.000	DAU		68 subdomain	110.000.000
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah terkoneksi jaringan intra sesuai standar penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah	Jombang	68 titik	2.350.000.000	DAU		68 titik	2.467.500.000
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	Jombang	20%	1.225.041.200			20%	1.347.589.800
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan penyelenggaraan SPBE pada aspek TIK	Jombang	2 dokumen	85.505.000	DAU		1 dokumen	94.100.000
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan standar pusat data	Jombang	25%	400.000.000	DAU		30%	440.000.000
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah sistem elektronik dibangun/ dikembangkan	Jombang	2 aplikasi	739.536.200	DAU		2 aplikasi	813.489.800
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				295.000.000				295.000.000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	Jombang	100%	295.000.000	DAU		100%	295.000.000
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	Jombang	3,52 (baik)				3,53 (baik)	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang	Jombang	3 dokumen	295.000.000			3 dokumen	295.000.000
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah koordinasi pengumpulan dan pengolahan data sektoral Kabupaten Jombang	Jombang	9 kali	175.000.000	DAU		9 kali	175.000.000
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang dikelola	Jombang	28 data sektoral	120.000.000	DAU		28 data sektoral	120.000.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				140.000.000				140.000.000

2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	Jombang	75%	140.000.000	DAU		100%	140.000.000
2.21.02.2.01	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi	Jombang	75%	140.000.000	DAU		100%	140.000.000
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengamanan informasi	Jombang	3 sistem elektronik	140.000.000	DAU		4 sistem Elektronik	140.000.000
TOTAL					16.194.127.632				15.058.648.232

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2022	
			K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	%	%	9.629.619.432
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	%	100%	50.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	dokumen	3 dokumen	25.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	dokumen	5 laporan	25.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	%	100%	4.369.619.432
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika yang di fasilitasi	kali	14 kali	4.109.619.432
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan penyediaan honorarium pengelola keuangan	kegiatan	11 kegiatan	250.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan OPD yang tersusun	dokumen	1 dokumen	10.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100%	1.000.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penerima informasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai	kegiatan	450 orang	1.000.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	1.110.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	lokasi	3 lokasi	500.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	lokasi	3 lokasi	250.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	jenis	2 jenis	250.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	jenis	4 jenis	50.000.000
	Jumlah pemenuhan barang penggandaan	jenis	1 jenis	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	media	3 media	10.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	kegiatan	5 kali	50.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100%	725.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terfasilitasi	lokasi	3 lokasi	375.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	jenis	5 jenis	350.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	%	100%	2.375.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit	1 unit	150.000.000
	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya	unit	1 unit	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	unit	17 unit	25.000.000
	Jumlah kendaraan dinas/operasional dibayarkan pajaknya	unit	17 unit	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	unit	2 lokasi	350.000.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasara gedung kantor yang dipelihara	lokasi	3 lokasi	1.850.000.000

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)		62 (sedang)	2.717.267.000
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang komunikasi dan informatika		84 (baik)	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	informasi publik	3,1%	2.717.267.000
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi	media	5 media	750.000.000
	Jumlah program siaran radio per minggu	program	7 program	
Pelayanan Informasi Publik	Prosentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti sesuai SOP PPID	permohonan	100%	245.449.000
	Prosentase pengaduan di SP4N LAPOR yang ditindaklanjuti	aduan	100%	
	Jumlah desa yang terbentuk KIM baru dan dilaksanakan pembinaan	KIM	5 desa	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah mitra kerjasama media cetak dan elektronik informasi pembangunan daerah	media	45	1.721.818.000
	Jumlah pengikut akun resmi pemerintah daerah di media sosial	Pengikut	13.000	
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi		Level 2	3.675.041.200
	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)	Indikator terkelola	18	
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah		100%	2.450.000.000
	Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain		100%	

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah subdomain sesuai standar penyelenggaraan subdomain	subdomain	64 subdomain	100.000.000
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah terkoneksi jaringan intra sesuai standar penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah	OPD	68 titik	2.350.000.000
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	%	20	1.225.041.200
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan SPBE pada aspek TIK yang disusun	Dokumen kebijakan	2	85.505.000
Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pusat data sesuai standar	persen	25%	400.000.000
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah sistem elektronik dibangun/ dikembangkan	System aplikasi	2	739.536.200
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	%	100%	295.000.000
	Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika		3,52 (baik)	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang	dokumen	3	295.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah koordinasi pengumpulan dan pengolahan data sektoral Kabupaten Jombang	kali	9	175.000.000
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang dikelola	Data portal	28	120.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik		75%	140.000.000
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi		75%	140.000.000
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengamanan informasi	sistem elektronik	3 sistem elektronik	140.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang pada tahun 2022 dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mewujudkan *Good Governance*.

Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran Dinas Kominfo Kabupaten Jombang untuk melakukan pengelolaan dan penataan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Jombang, maka secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi berbagai perubahan/dinamika yang terjadi. Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Kominfo ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik.

Jombang, 15 februari 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**



BUDI WINARNO, ST, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19741001 199901 1 001